KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Syadilla Dharayu Marista* dan Alfa Farah

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: syadilladharayum@students.undip.ac.id

ABSTRACT

The influence of corruption and economic growth remains a subject of debate. Generally, this study aims to empirically analyze the relationship between corruption and economic growth in 125 countries worldwide during the 2016-2019 period. Using the Fixed Effect Model (FEM) estimation method, the results show that the corruption variable has a positive but not significant impact on economic growth.

Keywords: Corruption and Economic Growth.





PENDAHULUAN

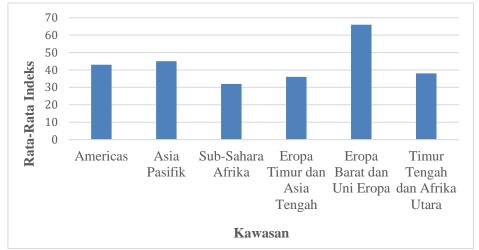
Menurut sudut pandang ilmu ekonomi, korupsi adalah salah satu bentuk perburuan rente ekonomi. Definisi perburuan rente dalam hal ini adalah pencarian keuntungan istimewa dari pemerintah (Hilman, 2013) (dalam Aidt, 2016). Aktivitas perburuan rente dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kekayaannya sendiri tanpa menimbulkan manfaat atau kekayaan apapun bagi masyarakat. Cara untuk mendapatkan perlakuan istimewa melibatkan penggunaan faktor-faktor produksi, misalnya tenaga kerja yang seharusnya digunakan dalam produksi output dikerahkan untuk aktivitas perburuan rente. Akibatnya, perekonomian menghasilkan produksi di bawah batas dan output berkurang. Para birokrat dan aparat pemerintah juga bisa menjual posisinya guna memperoleh penghasilan tambahan baik itu berupa uang suap dari pengusaha atau komisi dari proyek-proyek yang mereka tangani. Dalam konteks ini, korupsi didefinisikan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Tanzi, 1998), (Drury et al., 2006), dan (Bardhan, 2017).

Pejabat pemerintah menciptakan rente melalui suap. Suap ini mereka munculkan dengan memperkenalkan kelangkaan yang mereka buat melalui lisensi, perizinan, prosedur yang rumit, dan lain-lain. Lisensi, perizinan, dan prosedur yang rumit akan mendorong para pengusaha untuk menyuap pejabat pemerintah. Korupsi juga dapat muncul dalam administrasi perpajakan dan bea cukai ketika peraturan perundangundangan sulit dipahami dan memunculkan penafsiran yang berbeda sehingga wajib pajak memerlukan bantuan dalam mematuhinya ataupun dalam hal gaji petugas pajak yang rendah (Tanzi, 1998).

Aidt (2009) menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pandangan pertama menganggap bahwa korupsi sebagai penghambat pertumbuhan dan/atau "mengamplas" roda pembangunan (Sands The Wheel) dan pandangan kedua menganggap bahwa korupsi sebagai

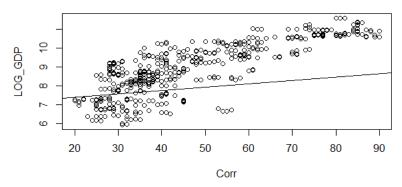


pendorong pertumbuhan dan/atau "melumasi" roda pembangunan (Grease The Wheel).



Grafik 1. Rata-Rata *Corruption Perception Index* (CPI) Tahun 2020 Sumber: Transparency International (2020), diolah

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Transparency International* tahun 2020, tingkat korupsi terendah dicapai oleh negara-negara pada kawasan Eropa Barat, sedangkan negara-negara pada kawasan Afrika Sub-Sahara menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Negara-negara dengan korupsi terendah antara lain Denmark, Finlandia, Swedia dan Swiss dan negara-negara dengan korpsi tertinggi antara lain Sudan, Somalia, dan Sudan Selatan. Seperti secara umum diketahui, negara-negara di Eropa Barat dan Uni Eropa lebih maju secara ekonomi dibandingkan dengan negara-negara di Afrika Sub-Sahara.



Gambar 1. Korelasi Antara Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Pada 125 Negara di Dunia Tahun 2016-2019

Sementara itu, Gambar 1 menunjukkan korelasi positif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi dengan angka korelasi sebesar 0,809. Ini berarti negara-negara yang tingkat korupsi nya rendah, pertumbuhan ekonomi nya tinggi. Namun, beberapa penelitian mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam karena disatu sisi korupsi berpengaruh negatif dan menghambat pertumbuhan ekonomi namun disisi lain korupsi dapat berpengaruh positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.



TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Menurut beberapa peneliti, seperti (Tanzi, 1998), (Drury et al., 2006), (Gruber, 2016), dan (Bardhan, 2017) korupsi secara sederhana diartikan sebagai aktivitas penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Menurut *Transparency International*, bentuk-bentuk korupsi sendiri juga mencakup pegawai negeri yang menuntut ataupun mengambil uang dan bantuan sebagai imbalan atas layanan yang telah mereka berikan, politisi yang menyalahgunakan uang publik atau memberikan pekerjaan serta kontrak publik kepada orang terdekat mereka dan perusahaan yang menyuap pejabat demi mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan.

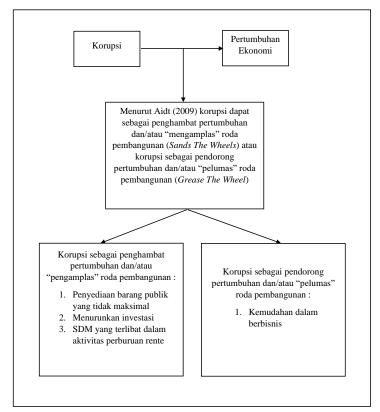
Korupsi adalah salah satu bentuk perburuan rente. Perburuan rente muncul karena adanya interaksi antara pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah memiliki monopoli dalam mengalokasikan hak milik, baik itu dengan undang-undang, peraturan, subsidi, pajak, tarif, kuota, atau dengan memberikan kontrak. Pemerintah dianggap dapat mengatur siapa yang dapat mendapatkan akses (Aidt, 2016). Definisi korupsi juga dapat diturunkan dari model *principal-agent*. Korupsi dianggap terjadi ketika agen melanggar aturan yang dibuat oleh *principal* dan berkolusi dengan pihak ketiga untuk mempromosikan keuntungannya sendiri.

Pengaruh Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori Neoklasik dijelaskan bahwa modal, tenaga kerja, dan teknologi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kasus korupsi yang melibatkan faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga perusahaan dan pemerintah. Menurut Aidt (2009) korupsi memiliki dua dampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu menghambat ekonomi dan/atau "mengamplas" roda pembangunan (*Sands The Wheel*) serta mendorong pertumbuhan dan/atau "melumasi" roda pembangunan (*Grease The Wheel*). Hubungan negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dalam penelitian Mo (2001) dan Gründler & Potrafke (2019). Hubungan positif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dalam penelitian Barreto (2001) dan Cabaravdic & Nilsson (2017). Gambar 2 dibawah ini menunjukkan kerangka pemikiran yang berisi mekanisme hubungan antarvariabel dalam penelitian.

Diantara tindakan korupsi yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi adalah kasus korupsi dalam penyediaan barang publik dimana pemerintah memiliki monopoli alami dalam penyediaannya. Kemudian, korupsi dalam proyek pengadaan barang jasa, dan sumber daya dibawah harga pasar, seperti valas, kredit, listrik, air, perumahan umum, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang melibatkan pemerintah dan perusahaan swasta. Alokasi untuk kontrak pengadaan barang melalui sistem yang korup seperti ini dapat menurunkan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Korupsi juga dapat menurunkan investasi karena adanya lembaga pemerintah yang kurang efisien (Mauro, 1995). Hal semacam ini mengurangi insentif dan menjadikan iklim investasi yang merupakan salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan modal pada suatu negara menjadi tidak sehat dan memilih berinvestasi di negara lain (Nasir et al., 2021). Maraknya kasus perburuan rente juga membuat sumber daya manusia dan tenaga kerja terdidik banyak terlibat dalam kasus perburuan rente (rent seeking) (Chetwynd et al., 2003).





Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Ada pula argumen yang menyatakan bahwa korupsi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, argumen ini berlaku ketika tata kelola suatu negara lemah. Ketika struktur pemerintahan lemah dan kebijakan tidak efektif korupsi dapat mempercepat kegiatan ekonomi (Aidt, 2009). Mauro (1995) menjelaskan bahwa para pengusaha mencoba mempercepat proses perizinan dan peraturan dengan "uang cepat" (speed money) agar dapat menghindari birokrasi yang rumit. Suap juga dapat menjadi pembayaran insentif untuk pelayanan yang baik.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Neoklasik

Dalam pandangan Neoklasik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan modal dan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik *Solow-Swan* memusatkan perhatiannya pada proses pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan ouput (Boediono, 2018). Teknologi produksi yang ada menentukan berapa banyak output/keluaran diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Dalam model *Solow-Swan*, teknologi adalah variabel eksogen yang mampu meningkatkan kemampuan penduduk untuk berproduksi sepanjang waktu. Fungsi produksi dalam Model Solow-Swan dituliskan sebagai berikut:

$$Y = F(K, L \times E) \tag{1}$$

keterangan : Y : Output K : Modal



L : Pertumbuhan Penduduk

E : Efisiensi tenaga kerja yang mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi

Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat. Namun, setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Diantara penelitian yang menyatakan bahwa korupsi berpangaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada penelitian Mo (2001) dan Gründler & Potrafke (2019) yang sama-sama menggunakan data *Corruption Perception Index* (CPI) sebagai ukuran variabel korupsi. Mo (2001) menggunakan 46 observasi dalam penelitian yang bertujuan memperkenalkan perspektif baru mengenai peran korupsi dalam pertumbuhan ekonomi dan dampaknya serta pentingnya saluran transmisi. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,72% dan ketidakstabilan politik menjadi saluran terpenting yang memengaruhi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gründler & Potrafke (2019) yang menggunakan data 175 negara selama tahun 2012-2018. Korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dimana GDP riil per kapita menurun sekitar 17% dalam jangka panjang khususnya pada negara-negara dengan kualitas pemerintahan dan lembaga politik yang rendah.

Sementara itu, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda dimana korupsi dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian Barreto (2001) yang menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana hubungannya dengan distribusi pendapatan. Barreto (2001) menggunakan 2 data set yang terdiri dari 58 negara berkembang dan terbelakang serta 56 negara. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa korupsi secara signifikan berkorelasi positif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga berkorelasi positif dan signifikan dengan ketimpangan yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan dikaitkan dengan korupsi yang lebih besar. Kemudian, Cabaravdic & Nilsson (2017) menguji hipotesis apakah korupsi berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi pada 14 negara di Eropa Selatan dan wilayah Balkan tahun 2003-2014. Selain variabel korupsi sebagai variabel independen, variabel lain yang juga dimasukkan yaitu pembentukan modal tetap bruto, keterbukaan perdagangan, FDI net inflow, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan populasi, lagged GDP riil per kapita dan structural break dummy. Dengan menggunakan tiga model regresi, korupsi berdampak positif pada pertumbuhan GDP riil perkapita di Eropa Selatan pada model regresi ketiga dengan memasukkan semua variabel penelitian.



METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita atas dasar harga konstan tahun 2015 yang diperoleh dari *World Bank*. Kemudian, variabel penjelas utama yaitu korupsi diukur dengan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dengan skala 0-100 dimana 0 diartikan sebagai negara yang sangat korup dan 100 diartikan sebagai negara yang bersih dari praktik korupsi. Penelitian ini juga memasukkan faktor-faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol, yaitu variabel teknologi yang diukur dengan *Global Innovation Index* (GII) yang dikeluarkan oleh *World Intellectual World Property Organization* (WIPO). Semakin besar *Global Innovation Index* (GII) semakin inovatif suatu negara. Kemudian, variabel tenaga kerja diukur dengan angkatan kerja (*labor force*) yang dilogaritmakan dan diperoleh dari *World Bank*. Variabel modal diukur menggunakan investasi asing langsung (dalam persen terhadap GDP) yang diperoleh dari *World Bank*. Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$logY_{it} = \alpha + \beta_1 Corr_{it} + \beta_2 Tech_{it} + \beta_3 LOG_T K_{it} + \beta_4 Cap_{it} + \varepsilon_{it}$$
 (2)

keterangan:

logY : Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2015 yang

dilogaritmakan yang dinyatakan dalam U.S Dollars

Corr : Korupsi yang diukur dengan *Corruption Perception Index* (CPI)
Tech : Teknologi yang diukur dengan *Global Innovation Index* (GII)
LOG_TK : Tenaga kerja yang dilogaritmakan yang dinyatakan dalam persen

ε : error term

Penelitian ini diestimasi menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Model FEM dipilih karena model ini memperbolehkan adanya korelasi antarvariabel yang tetap sepanjang waktu dengan *error*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel 125 negara di dunia selama periode 2016-2019 yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dari berbagai kumpulan data dan literatur. Alasan pemilihan tahun tersebut untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan data terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi ditampilkan dalam Tabel 1 menggunakan data lengkap. Sebelumnya telah dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa hasil estimasi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dengan asumsi Gauss-Markov. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10 yang berarti tidak ada masalah multikolinearitas sempurna. Hasil uji Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang artinya Ho ditolak dan demikian terdapat korelasi serial antarwaktu atau adanya masalah autokorelasi. Uji Breusch-Pagan menunjukkan bahwa p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang artinya Ho ditolak dan dengan demikian variansi error bersifat heteroskedastisitas. Standard error dalam estimasi OLS menjadi tidak valid karena adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi, penelitian ini melaporkan clustered robust standard error yang ditunjukkan dalam tanda kurung dibawah nilai koefisiensi.



Tabel 1. Hasil Estimasi

Variabel	Fixed Effect Model (Country FE)	
Korupsi (Corr)	0,0004	
	(0,001)	
	(0,729)	
Teknologi (Tech)	0,002*	
	(0,001)	
	(0,089)	
Tenaga Kerja (LOG_TK)	1,075***	
	(0,000)	
	(0,000)	
Modal (Cap)	0,0001	
	(0,000)	
	(0,638)	
Observasi	495	
\mathbb{R}^2	0,114	
Adjusted R ²	-0,196	
F Statistik	11,788***	

Korupsi sebagai variabel penjelas utama menunjukkan tanda positif tetapi tidak signifikan (*t*-statistik lebih besar dari tingkat signifikansi 10% ditunjukkan dalam tanda kurung dibawah nilai *standard error*). Variabel teknologi, tenaga kerja, dan modal masing-masing juga menunjukkan hasil dengan tanda positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hanya variabel teknologi dan tenaga kerja yang signifikan (*t*-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% dan 1% ditunjukkan dalam tanda kurung dibawah nilai *standard error*). Nilai koefisien variabel teknologi pada model FEM sebesar 0,002 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 indeks diasosiasikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen, sedangkan nilai koefisien variabel tenaga kerja sebesar 1,075 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen diasosiasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen, dan untuk koefisen variabel modal sebesar 0,0001 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen diasosiasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil.

Hasil estimasi juga menunjukkan nilai *adjusted* R² yang negatif dan nilai R² yang sangat rendah yaitu 0,114 yang artinya model pada penelitian ini hanya bisa menjelaskan sebesar 11,4 persen variasi dalam variabel dependen. Terjadinya hal ini bisa diantisipasi dengan menambahkan variabel lain untuk memperbesar nilai R². Kemudian, F-statistik menunjukkan nilai 11,788 lebih besar dari tingkat signifikansi berarti hipotesis nol diterima atau korupsi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, hasil analisis empiris menunjukkan tanda positif pada variabel korupsi. Meski demikian, variabel korupsi tidak signifikan dalam model FEM. Ketidaksignifikan ini bisa jadi disebabkan oleh adanya variabel kontrol lain yang tidak dimasukkan dalam model. Tanda positif dalam variabel korupsi menunjukkan bahwa korupsi berasosiasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan pandangan Aidt (2009) yaitu korupsi sebagai pendorong pertumbuhan dan/atau "melumasi" roda pembangunan (*Grease The Wheel*). Meski demikian, hasil estimasi tidak bisa mengonfirmasi sepenuhnya teori ini karena variabel korupsi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.



KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di 125 negara di dunia selama periode 2016-2019. Variabel penjelas utama dalam penelitian ini yaitu Korupsi diukur menggunakan Corruption Perception Index (CPI) yang diperoleh dari Transparency International (TI) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen diukur menggunakan GDP per kapita konstan tahun 2015 yang diperoleh dari World Bank dan dilogaritmakan. Selain itu, disertakan juga variabel kontrol yakni teknologi, tenaga kerja, dan modal. Penelitian ini diestimasi menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) yang menunjukkan bahwa variabel korupsi bertanda positif namun tidak signifikan. Jadi, penelitian ini tidak bisa sepenuhnya mengonfirmasi argumen Aidt (2009) yang mengatakan bahwa korupsi dapat menjadi "pelumas" roda pertumbuhan ekonomi (*Grease The Wheel*). Penelitian selanjutnya dapat menambahkan estimasi secara rinci misalnya berdasarkan wilayah/benua dengan menambahkan periode waktu.

REFERENSI

- Aidt, T. S. (2009). Corruption, institutions, and economic development. *Oxford Review of Economic Policy*, 25(2), 271–291. https://doi.org/10.1093/oxrep/grp012
- Aidt, T. S. (2016). Rent seeking and the economics of corruption. *Constitutional Political Economy*, 27(2), 142–157. https://doi.org/10.1007/s10602-016-9215-9
- Bardhan, P. (2017). Corruption and Development: A Review of Issues. *Political Corruption: Concepts and Contexts: Third Edition*, 35(3), 321–338. https://doi.org/10.4324/9781315126647-30
- Barreto, R. A. (2001). *Endogenous Corruption, Inequality And Growth: Econometric Evidence*. School Of Economics Adelaide University (Australia). Working Paper No. 01-2
- Boediono. (2018). *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE. Hal. 81 Cabaravdic, A., & Nilsson, M. (2017). The Impact of Corruption on Economic Growth. *Wealth Creation and Poverty Reduction*, 266–290. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1207-4.ch015
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). *Corruption and Poverty : A Review of Recent Literature*. Washington DC: Management Systems International.
- Drury, A. C., Krieckhaus, J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, democracy, and economic growth. *International Political Science Review*, 27(2), 121–136. https://doi.org/10.1177/0192512106061423
- Gruber, J. (2016). *Public Finance and Public Policy* (5th ed., Issue June). New York: Worth Publisers. Hal. 266
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 60(March), 101810. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics* 110(3), 681–712. from https://www.jstor.org/stable/2946696.
- Mo, P. H. (2001). Corruption and Economic Growth. *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 66–79. https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703
- Nasir, M. S., Wibowo, A. R., & Yansyah, D. (2021). The Determinants of Economic Growth: Empirical Study of 10 Asia-Pacific Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu*



Ekonomi 10(1), 511–546. https://doi.org/10.2307/j.ctv1ns7mrh.17
Tanzi, V. (1998). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. IMF Staff Papers, 45(4), 559–594. https://doi.org/10.2307/3867585